

**KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PERSPEKTIF EMPAT SIKLUS PENGANGGARAN****Dwi Wahyu Wijayanti<sup>✉</sup>, Henny Murtini**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

**Info Artikel***Sejarah Artikel:*

Diterima Desember 2014  
Disetujui Januari 2015  
Dipublikasikan Mei 2015

*Keywords:*

*PAD; Liquidity; Regional  
Expenditures; Audit  
Findings; Financial  
Performance*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis empat siklus penganggaran, yaitu tahap perencanaan (PAD), tahap persetujuan (likuiditas), tahap pelaksanaan (belanja daerah), dan tahap pertanggungjawaban (temuan audit). Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini dapat dilihat dari empat siklus penganggaran. Kinerja dikatakan baik ketika keterkaitan antar tahap memiliki efisiensi yang baik. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 pemerintah provinsi se-Indonesia, sehingga jumlah populasi keseluruhan sebanyak 66 LHP dengan 2 tahun pengamatan, yaitu 2011-2012 namun populasi yang dapat diteliti sebanyak 65 LHP. Teknik analisis yang digunakan adalah *partial least square-structural equation modeling* (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap PAD, dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, belanja daerah dan PAD tidak berpengaruh terhadap temuan audit. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran belanja daerah dan temuan audit yang berbeda serta menggunakan LHP BPK RI yang terbaru sehingga menggambarkan kondisi sesungguhnya.

**Abstract**

*This study aimed to examine and analyze four budget cycle, i.e. the planning stage (PAD), the agreement stage (liquidity), the implementation stage (regional expenditures), and the accountability stage (the audit findings). The financial performance of local governments can be seen from the four budget cycles. Performance is quite good when the relationship between stage has a good efficiency. The population in this study were 33 provinces in Indonesia, so that the overall population are 66 LHP with 2 years of observation, i.e. from 2011 to 2012 but the population can be examined as many as 65 LHP. The analysis technique used is partial least square-structural equation modeling (PLS-SEM). The results of this study indicate that the liquidity affects the PAD and PAD affects the regional expenditures, while the liquidity does not affects the regional expenditures, the regional expenditures and the PAD does not affects the audit findings. For further research can use different measurements of the regional expenditures and audit findings with uses the latest LHP BPK RI that describe real conditions.*

## PENDAHULUAN

Sejak Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001 dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, menjadikan tata pemerintahan daerah mengalami perubahan dari yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang baik tersebut akan dapat tercapai apabila didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik pula. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dicapai berdasarkan perencanaan dan kontrol yang tepat, selain itu sesuai dengan prinsip *value for money* yaitu harus dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD provinsi tahun 2012 mengungkapkan bahwa sebanyak 343 kasus dari 621 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 278 kasus. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini dapat terjadi akibat pengelolaan keuangan di daerah masih belum optimal. Agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah lebih optimal dan untuk meningkatkan kinerja keuangan, maka yang harus diperhatikan adalah siklus penganggaran yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2002: 69) bahwa aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral, maka manajer publik perlu mengetahui prinsip pokok siklus anggaran.

Teori keagenan menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik.

Akuntabilitas dan transparansi publik dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (*principal*) kepada pemegang amanah (*agent*). Masyarakat bertindak dengan kesadaran bagi kepentingan mereka dan menilai bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya dalam bertindak untuk melayani masyarakat sehingga menyebabkan *information asymetry* antara *agent* dan *principal*. Dengan adanya *information asymetry* tersebut menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2002: 70-73) empat tahapan dalam pelaksanaan anggaran pada pengelolaan keuangan daerah terdiri dari, tahap perencanaan anggaran yaitu tahap dimana dilakukannya taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Tahap persetujuan dimulai ketika kepala eksekutif atau petugas administrasi mengajukan anggaran yang diusulkan kepada pembuat kebijakan atau badan legislatif.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Tahap terakhir dari siklus penganggaran yaitu tahap pertanggungjawaban, tahap ini dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan anggaran selesai dilaksanakan/berakhir yaitu sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan keuangan pemerintah oleh lembaga independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari empat tahapan pada siklus penganggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik ketika keterkaitan antar tahapan memiliki efisiensi yang baik pula.

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Chen *et.al.* (2012) dengan

beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu empat siklus penganggaran pada penelitian ini disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dimana pada tahap perencanaan menggunakan indikator pendapatan asli daerah (PAD). Tahap kedua yaitu persetujuan dengan indikator likuiditas. Tahap ketiga pelaksanaan dengan indikator belanja daerah, dan pada tahap keempat yaitu tahap pertanggungjawaban dengan indikator temuan audit. Perbedaan kedua dari penelitian ini adalah dilakukan pada 33 provinsi di Indonesia dan menggunakan tahun anggaran 2011-2012. Perbedaan ketiga adalah pada penelitian ini menggunakan analisis PLS-SEM (*Partial Least Square-Structural Equation Modeling*).

Kebijakan desentralisasi diharapkan semua pemerintah daerah dapat membiayai urusan rumah tangganya dan pembangunan di daerah dengan bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD). Hadi (2010) menyatakan bahwa kaitan logis antara likuiditas dengan kemandirian daerah adalah terletak pada keadaan posisi kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai semua urusan pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah. Hubungan likuiditas dan kemandirian daerah ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas berarti menaikkan tingkat kemandirian daerah sehingga semakin kecil unsur utang dan tidak terbebani daerah dengan sumber dana eksternal dari pinjaman atau utang.

**H<sub>1</sub> : Likuiditas berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah (PAD).**

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, dimana daerah otonom dituntut untuk mengatur masyarakat dan daerahnya sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan dalam merealisasikan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan kemandirian daerah dan kesiapan suatu daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Menurut Maimunah (2006)

bahwa semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin besar pula belanja daerah.

**H<sub>2</sub> : Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah.**

Era desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah memiliki penerimaan yang berasal dari daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut diharapkan adanya peningkatan layanan publik sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Namun, hal tersebut akan berdampak pada membengkaknya belanja daerah. Untuk melakukan pembangunan pemerintah daerah membutuhkan dana dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga menyebabkan pemerintah daerah meminjam dana kepada pemerintah pusat/provinsi/pihak eksternal. Menurut Guspiati (2008) likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan biaya yang sesuai. Keadaan likuiditas yang rendah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah sulit dalam membayar utang-utangnya dan sebaliknya. Pemerintah daerah yang memiliki sumber penerimaan berlebih dan utang yang dimiliki relatif tidak besar maka dapat meningkatkan belanja modal yang akan menambah aset daerah. Semakin banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan meningkatkan belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik.

**H<sub>3</sub> : Likuiditas berpengaruh terhadap belanja daerah.**

Menurut Halim (2002: 68), belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu: belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga.

Tuannakota (2009: 34) dalam Kristanto (2009) merinci delapan belas modus korupsi di daerah, antara lain ditemukan bahwa ada pengusaha yang seringkali mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar pengusaha tersebut

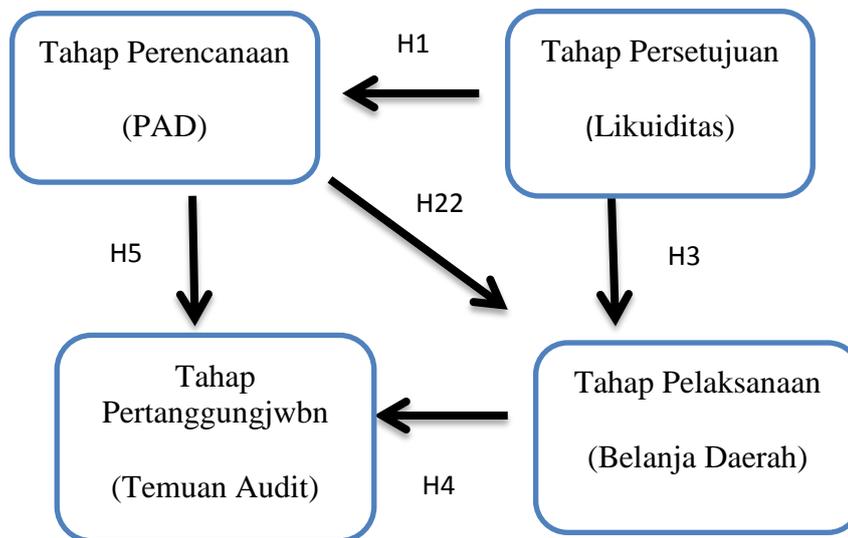
dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung kemudian harga barang/jasa dinaikkan (*markup*), yang pada akhirnya selisihnya dibagi-bagikan. Belanja modal dapat menjadi obyek penyelewengan atau korupsi sehingga diperlukan pengendalian intern yang baik.

**H<sub>4</sub> : Belanja daerah berpengaruh terhadap temuan audit.**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari optimalisasi sumber daya yang ada di daerah. Pendapatan asli daerah, terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain

**H<sub>5</sub> : Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap temuan audit.**

pendapatan asli daerah yang sah. Besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya dari daerah masing-masing. Petrovits, Shakespeare, and Shih (2010) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah sumber pendapatan yang terdapat pada pendapatan asli daerah (PAD), justru akan membuat masalah pada pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan Kristanto (2009) dan Hartono (2014) tidak menemukan adanya pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kelemahan pengendalian intern.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

**METODE PENELITIAN**

**Populasi, Sampel, dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari 33 provinsi se-Indonesia untuk tahun anggaran 2011-2012, sehingga jumlah populasi keseluruhan sebanyak 66 LHP namun yang dapat diteliti sebanyak 65 LHP. Hal ini karena

Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2011 tidak memiliki utang jangka pendek sehingga untuk indikator likuiditas tidak dapat dihitung secara statistik. Metode analisis yang digunakan adalah *partial least square-structural equation modeling* (PLS-SEM) dengan menggunakan Smartpls 2.0 M3. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi berupa data sekunder. Data tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI dari 33 pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2011-2012 yang telah diaudit.

**Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini ada lima yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dan empat siklus penganggaran dengan indikator pendapatan asli daerah (PAD), likuiditas, Tabel 1. Definisi Operasional

belanja daerah, dan temuan audit. Definisi operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu ukuran kinerja dengan menggunakan indikator rasio keuangan	
Tahap Perencanaan (PAD)	Dimulai dari dilakukannya taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia secara lebih akurat	$\frac{\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pem. pusat/provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$
Tahap Persetujuan (Likuiditas)	Dimulai ketika kepala eksekutif atau petugas administrasi mengajukan anggaran yang diusulkan kepada pembuat kebijakan atau badan legislatif.	$\text{Rasio lancar (current ratio)} = \frac{\text{Aktiva Lancar - Persediaan}}{\text{Utang Jangka Pendek}}$
Tahap Pelaksanaan (Belanja Daerah)	Manajer keuangan publik dituntut untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan untuk menyusun anggaran periode berikutnya.	Ln dari belanja daerah
Tahap Pertanggungjawaban (Temuan Audit)	Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Kewajiban pihak pemegang amanah ( <i>agent</i> ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kepada pihak pemberi amanah ( <i>principal</i> ) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.	Ln dari temuan audit

**Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji multikolinieritas, statistik inferensial, dan uji hipotesis dengan menggunakan Smartpls 2.0 M3.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uji *inner model* atau *structural model* digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten atau konstruk. Hasil uji *inner model* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji *Inner Model*

	Original Sample (o)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( o/STERR )
Likuiditas => PAD	-0,053981	-0,074214	0,027980	0,027980	1,929274
PAD => Belanja Daerah	0,688331	0,693824	0,051448	0,051448	13,379227
Likuiditas=>Belanja Daerah	0,000086	0,012377	0,067463	0,067463	0,001281
BelanjaDaerah=>TemuanAudit	-0,141097	-0,144318	0,164848	0,164848	0,855924
PAD => Temuan Audit	0,022981	0,031304	0,137720	0,137720	0,166866

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015.

Hipotesis pertama adalah likuiditas berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai *t-statistic* pada uji *inner model* adalah sebesar 1,929 dimana nilai *t-statistic* lebih besar dari nilai signifikansi *weight* 1,65 untuk  $\alpha = 10\%$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sehingga **H1 diterima**. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Hadi (2010) yang menyatakan kaitan logis likuiditas dan kemandirian daerah adalah terletak pada keadaan posisi kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai semua urusan pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah. Hubungan likuiditas dan kemandirian daerah. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah sehingga semakin kecil unsur utang.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai *t-statistic* pada uji *inner model* adalah sebesar 13,379 dimana nilai *t-statistic* lebih besar dari nilai signifikansi *weight* yaitu 2,58 untuk  $\alpha = 1\%$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh

terhadap belanja daerah, sehingga **H2 diterima**. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maimunah (2006) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Hal ini bermakna bahwa semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin besar pula belanja daerah.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah likuiditas berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai *t-statistic* pada uji *inner model* adalah sebesar 0,001 dimana nilai *t-statistic* lebih kecil dari nilai signifikansi *weight* yaitu sebesar 1,65 untuk  $\alpha = 10\%$ . Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, sehingga **H3 ditolak**.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Harianto dan Adi (2007) bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik maka belanja daerah tinggi. Keadaan likuiditas tinggi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan daerah yang berlebih dan utang yang dimiliki relatif tidak besar. Adanya hal tersebut pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja modal (aset) daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi. Namun hal tersebut juga meningkatkan belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, dan sebaliknya.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah belanja daerah berpengaruh terhadap temuan audit. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, diketahui bahwa nilai *t-statistic* pada uji *inner model* sebesar 0,856, dimana nilai *t-statistic* lebih kecil dari nilai signifikansi *weight* sebesar 1,65 untuk  $\alpha = 10\%$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap temuan audit, sehingga **H4 ditolak**. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mauro (1998) dalam Kristanto (2009) berpendapat bahwa korupsi lebih mudah dilakukan pada belanja anggaran yang memudahkan terjadinya suap, *markup*, dan membuat tindakan tersebut tidak terdeteksi. Pemerintah telah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik dan amanat demi menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan dengan ketat demi mengurangi tindak penyelewengan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap temuan audit. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, diketahui bahwa nilai *t-statistic* pada uji *inner model* sebesar 0,167, dimana nilai *t-statistic* lebih kecil dari nilai signifikansi *weight* sebesar 1,65 untuk  $\alpha = 10\%$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap temuan audit, sehingga **H5 ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009) dan Hartono (2014) tidak menemukan adanya pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kelemahan pengendalian intern. Besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi sumber daya dari daerah masing-masing. Pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi juga meningkatkan risiko

kecurangan, sehingga dibutuhkan pengendalian intern yang baik untuk meminimalisir adanya tindak kecurangan.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja dari empat siklus penganggaran, yaitu tahap perencanaan (PAD), tahap persetujuan (likuiditas), tahap pelaksanaan (belanja daerah), dan tahap pertanggungjawaban (temuan audit). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap PAD, dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, belanja daerah dan PAD tidak berpengaruh terhadap temuan audit. Saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang berbeda pada indikator belanja daerah dengan cara melihat besarnya persentase belanja daerah pada tahun tersebut, sedangkan temuan audit dengan cara melihat besarnya kerugian daerah (dalam rupiah) tahun tersebut dibagi dengan besarnya anggaran tahun tersebut serta menggunakan LHP BPK RI yang terbaru sehingga menggambarkan kondisi sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012. Jakarta. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 1 April 2015 pukul 22.24.
- Chen, Tser-Yieth; Tsai-Lien Yeh, and Mao-ming Chung. 2012. "Financial Performance of township governments and its four budget cycles". *African Journal of Business Management*, Vol. 6 (2), pp. 530-537. Taiwan, Republic of China. National Taipei University.
- Guspiati, Shopi. 2008. "Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Profitabilitas

- (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Tahun 2004-2007)". *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hadi, Waskito. 2010. "Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh)". *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 3, No. 1. Hal 29-51. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Aceh.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta. Salemba Empat.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Hartono, Rudi. 2014. "Pengaruh Pertumbuhan, Ukuran, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Vol.9 No. 1-ISSN: 1411-691X.
- Maimunah, Mutiara. 2006. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera". *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.
- Pemerintah Indonesia, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Petrovits, Christine, Chaterine Shakespeare, and Aimee Shih. 2010. "The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations".

Sejak Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001 dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, menjadikan tata pemerintahan daerah mengalami perubahan dari yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang baik tersebut akan dapat tercapai apabila didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik pula. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dicapai berdasarkan perencanaan dan kontrol yang tepat, selain itu sesuai dengan prinsip *value for money* yaitu harus dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD provinsi tahun 2012 mengungkapkan bahwa sebanyak 343 kasus dari 621 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakefektifan, dan ketidakefektifan sebanyak 278 kasus. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini dapat terjadi akibat pengelolaan keuangan di daerah masih belum optimal. Agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah lebih optimal dan untuk meningkatkan kinerja keuangan, maka yang harus diperhatikan adalah siklus penganggaran yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2002: 69) bahwa aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral, maka manajer publik perlu mengetahui prinsip pokok siklus anggaran.

Teori keagenan menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Akuntabilitas dan transparansi publik dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (*principal*) kepada pemegang amanah (*agent*). Masyarakat bertindak dengan kesadaran bagi kepentingan mereka dan menilai bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya dalam bertindak untuk melayani masyarakat sehingga menyebabkan *information asymetry* antara *agent* dan *principal*. Dengan adanya *information asymetry* tersebut menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2002: 70-73) empat tahapan dalam pelaksanaan anggaran pada pengelolaan keuangan daerah terdiri dari, tahap perencanaan anggaran yaitu tahap dimana dilakukannya taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Tahap persetujuan dimulai ketika kepala eksekutif atau petugas administrasi mengajukan anggaran yang diusulkan kepada pembuat kebijakan atau badan legislatif. Pada tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Tahap terakhir dari siklus penganggaran yaitu tahap pertanggungjawaban, tahap ini dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan anggaran selesai dilaksanakan/berakhir yaitu sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan keuangan pemerintah oleh lembaga independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari empat tahapan pada siklus penganggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik ketika keterkaitan antar tahapan memiliki efisiensi yang baik pula.

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Chen *et.al.* (2012) dengan beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu empat siklus penganggaran pada penelitian ini disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dimana pada tahap perencanaan menggunakan indikator pendapatan asli daerah (PAD). Tahap kedua yaitu persetujuan dengan indikator likuiditas. Tahap ketiga pelaksanaan dengan indikator belanja daerah, dan pada tahap keempat

yaitu tahap pertanggungjawaban dengan indikator temuan audit. Perbedaan kedua dari penelitian ini adalah dilakukan pada 33 provinsi di Indonesia dan menggunakan tahun anggaran 2011-2012. Perbedaan ketiga adalah pada penelitian ini menggunakan analisis PLS-SEM (*Partial Least Square-Structural Equation Modeling*).

Kebijakan desentralisasi diharapkan semua pemerintah daerah dapat membiayai urusan rumah tangganya dan pembangunan di daerah dengan bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD). Hadi (2010) menyatakan bahwa kaitan logis antara likuiditas dengan kemandirian daerah adalah terletak pada keadaan posisi kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai semua urusan pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah. Hubungan likuiditas dan kemandirian daerah ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas berarti menaikkan tingkat kemandirian daerah sehingga semakin kecil unsur utang dan tidak terbebannya daerah dengan sumber dana eksternal dari pinjaman atau utang.

**H<sub>1</sub> : Likuiditas berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah (PAD).**

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, dimana daerah otonom dituntut untuk mengatur masyarakat dan daerahnya sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan dalam merealisasikan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan kemandirian daerah dan kesiapan suatu daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Menurut Maimunah (2006) bahwa semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin besar pula belanja daerah.

**H<sub>2</sub> : Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah.**

Era desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah memiliki penerimaan yang berasal dari daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut diharapkan adanya peningkatan layanan publik sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Namun, hal tersebut akan berdampak pada membengkaknya belanja daerah. Untuk melakukan pembangunan pemerintah daerah membutuhkan dana dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga menyebabkan pemerintah daerah meminjam dana kepada pemerintah pusat/provinsi/pihak eksternal. Menurut Guspiati (2008) likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan biaya yang sesuai. Keadaan likuiditas yang rendah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah sulit dalam membayar utang-utangnya dan sebaliknya. Pemerintah daerah yang memiliki sumber penerimaan berlebih dan utang yang dimiliki relatif tidak besar maka dapat meningkatkan belanja modal yang akan menambah aset daerah. Semakin banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan meningkatkan belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik.

**H<sub>3</sub> : Likuiditas berpengaruh terhadap belanja daerah.**

Menurut Halim (2002: 68), belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu: belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga.

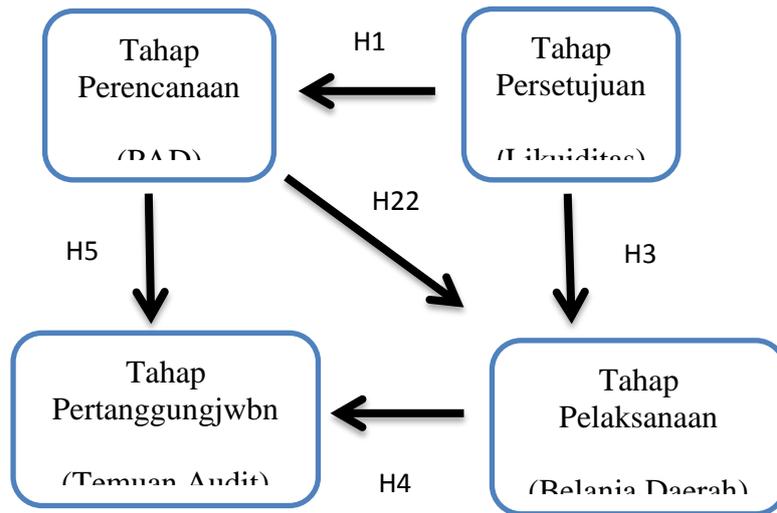
Tuannakota (2009: 34) dalam Kristanto (2009) merinci delapan belas modus korupsi di daerah, antara lain ditemukan bahwa ada pengusaha yang seringkali mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar pengusaha tersebut dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung kemudian harga barang/jasa dinaikkan (*markup*), yang pada akhirnya selisihnya dibagi-bagikan. Belanja modal dapat menjadi obyek penyelewengan atau korupsi sehingga diperlukan pengendalian intern yang baik.

**H<sub>4</sub> : Belanja daerah berpengaruh terhadap temuan audit.**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari optimalisasi sumber daya yang ada di daerah. Pendapatan asli daerah, terdiri dari hasil pajak

daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya dari daerah masing-masing. Petrovits, Shakespeare, and Shih (2010) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah sumber pendapatan yang terdapat pada pendapatan asli daerah (PAD), justru akan membuat masalah pada pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan Kristanto (2009) dan Hartono (2014) tidak menemukan adanya pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kelemahan pengendalian intern.

**H<sub>5</sub> : Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap temuan audit.**



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

**METODE PENELITIAN**

**Populasi, Sampel, dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari 33 provinsi se-Indonesia untuk tahun anggaran 2011-2012, sehingga jumlah populasi keseluruhan sebanyak 66 LHP namun yang dapat diteliti sebanyak 65 LHP. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2011 tidak memiliki utang jangka pendek sehingga untuk indikator likuiditas tidak dapat dihitung secara statistik. Metode analisis yang digunakan adalah *partial least square-structural equation modeling* (PLS-SEM) dengan menggunakan Smartpls 2.0 M3. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi berupa data sekunder. Data tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI dari 33 pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2011-2012 yang telah diaudit.

**Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini ada lima yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dan empat siklus penganggaran dengan indikator pendapatan asli daerah (PAD), likuiditas, belanja daerah, dan temuan audit. Definisi operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut

**Tabel 1**  
**Definisi Operasional**

Variabel	Definisi	Pengukuran
----------	----------	------------

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu ukuran kinerja dengan menggunakan indikator rasio keuangan	
Tahap Perencanaan (PAD)	Dimulai dari dilakukannya taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia secara lebih akurat	Rasio Kemandirian = $\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman}} \times 1$
Tahap Persetujuan (Likuiditas)	Dimulai ketika kepala eksekutif atau petugas administrasi mengajukan anggaran yang diusulkan kepada pembuat kebijakan atau badan legislatif.	Rasio lancar (current ratio) = $\frac{\text{Aktiva Lancar - Persediaan}}{\text{Utang Jangka Pendek}}$
Tahap Pelaksanaan (Belanja Daerah)	Manajer keuangan publik dituntut untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan untuk menyusun anggaran periode berikutnya.	Ln dari belanja daerah
Tahap Pertanggungjawaban (Temuan Audit)	Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Kewajiban pihak pemegang amanah ( <i>agent</i> ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kepada pihak pemberi amanah ( <i>principal</i> ) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.	Ln dari temuan audit

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji multikolinieritas, statistik inferensial, dan uji hipotesis dengan menggunakan Smartpls 2.0 M3.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji *inner model* atau *structural model* digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten atau konstruk. Hasil uji *inner model* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**

**Hasil Uji Inner Model**

Ori ginal Sample (o)	Samp le Mean (M)	Sta ndard Deviation (ST)	Sta ndard Error (ST)	T Statistics ( o/ST ERR )
----------------------	------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------

				DEV)	ERR)		
Likuiditas =>	-	-		0,02	0,02		1,92927
PAD	0,053981	0,074214	7980	7980	4		
PAD =>	0,68	0,693		0,05	0,05		
Belanja Daerah	8331	824	1448	1448			13,379227
Likuiditas =>	0,00	0,012		0,06	0,06		0,00128
Belanja Daerah	0086	377	7463	7463	1		
Belanja Daerah	-	-		0,16	0,16		0,85592
=> Temuan Audit	0,141097	0,144318	4848	4848	4		
PAD =>	0,02	0,031		0,13	0,13		0,16686
Temuan Audit	2981	304	7720	7720	6		

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015.

Hipotesis pertama adalah likuiditas berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai *t-statistic* pada uji *inner model* adalah sebesar 1,929 dimana nilai *t-statistic* lebih besar dari nilai signifikansi *weight* 1,65 untuk  $\alpha = 10\%$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sehingga **H1 diterima**. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Hadi (2010) yang menyatakan kaitan logis likuiditas dan kemandirian daerah adalah terletak pada keadaan posisi kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai semua urusan pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah. Hubungan likuiditas dan kemandirian daerah. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah sehingga semakin kecil unsur utang.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai *t-statistic* pada uji *inner model* adalah sebesar 13,379 dimana nilai *t-statistic* lebih besar dari nilai signifikansi *weight* yaitu 2,58 untuk  $\alpha = 1\%$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah, sehingga **H2 diterima**. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maimunah (2006) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Hal ini bermakna bahwa semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin besar pula belanja daerah.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah likuiditas berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai *t-statistic* pada uji *inner model* adalah sebesar 0,001 dimana nilai *t-statistic* lebih kecil dari nilai signifikansi *weight* yaitu sebesar 1,65 untuk  $\alpha = 10\%$ . Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, sehingga **H3 ditolak**.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Harianto dan Adi (2007) bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik maka belanja daerah tinggi. Keadaan likuiditas tinggi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan daerah yang berlebih dan utang yang dimiliki relatif tidak besar. Adanya hal tersebut pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja modal (aset) daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi. Namun hal tersebut juga meningkatkan belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, dan sebaliknya.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah belanja daerah berpengaruh terhadap temuan audit. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, diketahui bahwa nilai *t-statistic* pada uji *inner model* sebesar 0,856, dimana nilai *t-statistic* lebih kecil dari nilai signifikansi *weight* sebesar 1,65 untuk  $\alpha = 10\%$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap temuan audit, sehingga **H4 ditolak**. Penelitian ini berbeda dengan

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mauro (1998) dalam Kristanto (2009) berpendapat bahwa korupsi lebih mudah dilakukan pada belanja anggaran yang memudahkan terjadinya suap, *markup*, dan membuat tindakan tersebut tidak terdeteksi. Pemerintah telah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik dan amanat demi menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan dengan ketat demi mengurangi tindak penyelewengan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap temuan audit. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, diketahui bahwa nilai *t-statistic* pada uji *inner model* sebesar 0,167, dimana nilai *t-statistic* lebih kecil dari nilai signifikansi *weight* sebesar 1,65 untuk  $\alpha = 10\%$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap temuan audit, sehingga **H5 ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009) dan Hartono (2014) tidak menemukan adanya pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kelemahan pengendalian intern. Besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi sumber daya dari daerah masing-masing. Pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi juga meningkatkan risiko kecurangan, sehingga dibutuhkan pengendalian intern yang baik untuk meminimalisir adanya tindak kecurangan.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja dari empat siklus penganggaran, yaitu tahap perencanaan (PAD), tahap persetujuan (likuiditas), tahap pelaksanaan (belanja daerah), dan tahap pertanggungjawaban (temuan audit). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap PAD, dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, belanja daerah dan PAD tidak berpengaruh terhadap temuan audit. Saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang berbeda pada indikator belanja daerah dengan cara melihat besarnya persentase belanja daerah pada tahun tersebut, sedangkan temuan audit dengan cara melihat besarnya kerugian daerah (dalam rupiah) tahun tersebut dibagi dengan besarnya anggaran tahun tersebut serta menggunakan LHP BPK RI yang terbaru sehingga menggambarkan kondisi sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012. Jakarta. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 1 April 2015 pukul 22.24.

Chen, Tser-Yieth; Tsai-Lien Yeh, and Mao-ming Chung. 2012. "Financial Performance of township governments and its four budget cycles". *African Journal of Business Management*, Vol. 6 (2), pp. 530-537. Taiwan, Republic of China. National Taipei University.

Guspiati, Shopi. 2008. "Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Tahun 2004-2007)". *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Hadi, Waskito. 2010. "Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh)". *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 3, No. 1. Hal 29-51. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Aceh.

- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta. Salemba Empat.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Hartono, Rudi. 2014. "Pengaruh Pertumbuhan, Ukuran , dan Pendapatan Asli Derah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Vol.9 No. 1-ISSN: 1411-691X.
- Maimunah, Mutiara. 2006. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera". *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.
- Pemerintah Indonesia, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Petrovits, Christine, Chaterine Shakespeare, and Aimee Shih. 2010. "The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations".